REFORMULASI SANKSI PIDANA KEKERASAN PSIKIS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Oleh: Limtila Kirmila

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H.

Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.

Alamat: Jln. N. Manggis No. 46 Pekanbaru

Email/Telepon : limtila.kirmila2173@student.unri.ac.id/0821-6695-7672

ABSTRACT

Deletion Domestic Violence Act Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, which asking everyone to respect human rights by not committing violence both physically and psychologically. But the datas show that the domestic violence can be the top of an iceberg. That's why as a countermeasure physical violence which increase and the importance of giving birth to a new paradigm, to change the public perception about psychic violence which happened in the household, It is necessary to reformulate criminal sanctions as stipulated in Article 45 Violence Act Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence to present more precise laws in answering the needs of modernization. The purpose of this research is to know the application of criminal sanctions of psychic violence that occurs in the household in the Indonesian legal system, and form the idea of reformulation of appropriate sanctions against criminal acts of domestic psychic violence.

This research is normative legal research supported by primary data in the form of interviews. Also called doctrinal legal research which legal research that uses data based on literature research by taking quotes from literatur-literatur that have something to do with the problem to be researched. Thus the study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study also used qualitative data analysis and produced descriptive data.

From the results of discussions and research conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, the criminal sanctions of psychic violence as stipulated in Article 45 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence are classified as sanctions that are not implementative and do not consider the impact of psychic violence that can be worse than physical violence. In the end, existing sanctions become obstacles in projecting the law as a tool of social engineering that is fair and beneficial to society. Second, the increase in criminal sanctions in the form of imprisonment and criminal fines, and adding treatment and /or treatment in the form of rehabilitation is an idea that is compiled by considering the outlook of life, awareness and legal ideals, as well as the philosophy of the Indonesian nation derived from Pancasila and the Opening of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945.

Key Words: Reformulation – Criminal Sanctions – Psychic Violence

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur negara hukum yang dipelopori oleh John Locke. Menurutnya, manusia memiliki *natural rights* yang melekat pada manusia sejak dilahirkan. Hak alamiah atau hak kodrati ini bukan merupakan pemberian dari negara, namun melekat pada manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia.¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sejatinya mengajak setiap orang untuk menghormati hak-hak manusia dengan tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Namun pada prakteknya, kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diibaratkan sebagai puncak gunung es (*top of the iceberg*).

Dampak kekerasan psikis yang kerap kali lebih berat dari kekerasan fisik, dan meningkatnya kasus kekerasan psikis² setiap tahun serta menjadi kategori kekerasan yang paling banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuktikan tujuan pemidanaan, yakni melindungi tertib hukum, untuk mencegah kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan³ masih belum tercapai. Oleh karenanya sebagai upaya penanggulangan kekerasan psikis yang semakin meningkat dan pentingnya

¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 121.

² Kekerasan psikis yang dilaporkan misalnya: perselingkuhan, poligami, mendapat ejekan, kata-kata kasar, pengancaman, diusir dari rumah, dicerai sepihak, dikriminalkan, dan sebagainya. Lihat, Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan", *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, 2020, hlm.31.

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 15.

melahirkan paradigma baru, guna mengubah perspektif masyarakat terhadap kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga, maka perlu dilakukan reformulasi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk menghadirkan hukum yang lebih tepat dalam mengatasi tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan dan penerapan sanksi pidana kekerasan psikis yang terjadi di rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah reformulasi sanksi yang tepat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan dan penerapan sanksi pidana kekerasan psikis yang terjadi di rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia; dan
- b. Untuk mengetahui reformulasi sanksi yang tepat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka penulis tentang tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya pada ranah kekerasan psikis;
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana

- husus penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; dan
- c. Sebagai wacana luas untuk memberikan paradigma baru terhadap pembaharuan hukum pidana, khususnya pembaharuan sanksi pidana terhadap kekerasan psikis yang terjadi di rumah tangga.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran).⁴ Kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), guna memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau usaha dalam membentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang.⁵

Menurut Paul Cornil, kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat di pidana. Tetapi juga termaksud penambahan atau peningkatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.⁶ Tujuan utama kebijakan kriminal ini adalah sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana, agar kesejahteraan sosial dalam kehidupan di masyarakat dapat tercapai.

⁴ Handoko Duwi, *Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015, hlm. 13.

⁵ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 22.

⁶ Paul Cornil, "Criminality and Deviance in a Changing World", Ceramah pada Kongress PBB IV 1970 mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offender*.

2. Teori Pidanaan Relatif

Teori pidanaan relatif menekankan bahwa secara garis besar tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, serta sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku, maupun pencegahan umum (*general preventie*) untuk melindungi masyarakat. Teori relatif berdasar pada tiga tujuan pidanaan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif.

Teori ini diadopsi Indonesia dan dijadikan sebagai filosofi pidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Begitupula dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP yang dalam tujuan pidanaannya secara tegas menyebutkan "Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia".⁷

Sejalan dengan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Bahwa Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi berarti memformat ulang keadaan (atau apapun) yang ada, karena ia jauh dari ideal.⁹

⁷ Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 16.

⁹ <https://www.kompasiana.com/opiksuka/5512dbfaa33311de67ba7d74/reformulasi-gerakan->

2. Kekerasan Psikis diformulasikan secara alternatif limitatif sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁰
3. Sanksi merupakan unsur pemaksa bagi ditaatinya norma hukum.¹¹
4. Fenomena Gunung Es¹² kerap digunakan para aktivis maupun akademisi hukum untuk menggambarkan jumlah permasalahan yang diketahui lebih sedikit dari keadaan di lapangan yang sebenarnya jauh lebih banyak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai peneliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan wawancara. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.¹³

mahasiswa, diakses Sabtu, 29 Mei 2021. Pukul 18.06 WIB.

¹⁰ Y. A. Triana Ohoiwutun dan Surjanti, "Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa dalam Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga", Fakultas Hukum Universitas Jember, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, Desember 2018: 327 - 345, hlm. 338.

¹¹ H.M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 645.

¹² Fenomena Gunung Es dikemukakan oleh Sigmund Freud, menggambarkan gunung es yang sebagian kecil tampak dipermukaan, bagian terbesar tidak tampak karena ada didalam samudera. Lihat Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Et. II, Pustaka Pelajar Offset, 1997, hlm. 45.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 43.

Penelitian normatif ini pada pokok pembahasannya meneliti tentang asas-asas hukum, terutama terhadap "asas keadilan".

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian ditunjang dengan data primer berupa wawancara.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasarakatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Catur Komnas Perempuan, Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, kajian atau riset ilmiah, dan berbagai makalah, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan merangkum dan mengelompokkan data-data dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum normatif data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Selanjutnya peneliti akan menganalisa, mengolah dan membahas serta membentuk gagasan hukum pembaharuan sanksi pidana.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer sebagai penunjang yang dalam hal ini berupa wawancara. Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif. Jika diperlukan peneliti juga menggunakan metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang obyek yang diteliti menurut hukum.¹⁴

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁵

Secara bahasa, kekerasan adalah sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan

penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang.¹⁶ Dalam pengertian yang luas kekerasan juga dapat meliputi serangan psikologis berupa kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan, dan sejenisnya, yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.¹⁷

Dalam konvensi HAM Internasional *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* telah diatur konsensus bersama yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia. Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸

Di Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan

¹⁴ M. Endriyo Susila et al, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 40-41.

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 60.

¹⁶ Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori 1)*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 435.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 436.

¹⁸ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hlm. 40-41.

dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.¹⁹ Dengan demikian perlindungan hak korban KDRT mendapat legitimasi hukum yang jelas dan adil.²⁰

B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Hukum dan psikologi senantiasa seirama menyelesaikan masalah manusia serta memperbaiki kondisi manusia.²¹ Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Dengan pengertian ini, kekerasan psikis menurut undang-undang lebih berfokus pada akibat dari kekerasan itu sendiri, atau dengan kata lain merupakan bentuk konflik pasif yang biasa terjadi di dalam sebuah rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, sebagai delik materiel melarang akibat tertentu yang berada pada ranah psikis atau kejiwaan seseorang sebagai akibat dari perbuatan orang lain.²² Sehingga, Adanya akibat trauma psikis pada formulasi delik kekerasan psikis dalam rumah tangga menjadi titik kulminasi pembuktian perbuatan dan kesalahan terdakwa.²³ Kekerasan psikis pada umumnya dapat berupa kekerasan verbal, seperti caci maki

dan menyampaikan pernyataan negatif mengenai tubuh, serta dapat berupa pengabaian, menciptakan rasa takut dan khawatir, tidak memberikan perhatian, menghilangkan kesenangan, hingga memaksa untuk melakukan sesuatu.²⁴ Parahnya lagi tekanan, intimidasi dan ancaman yang diterima korban kekerasan psikis akan membekas dan mempengaruhi kestabilan diri, cara pandang, sikap, pola pikir dan perilaku korban yang menyebabkan traumatik berkelanjutan, terganggunya kejiwaan level rendah sampai akut, suka menyendiri, berbicara sendiri, hingga bunuh diri.²⁵

C. Tinjauan Umum tentang Sanksi Kekerasan Psikis di Negara Lain

Kekerasan psikis sebagai sebuah tindak pidana tidak hanya diatur di dalam hukum positif Indonesia. Tetapi juga diatur diberbagai negara, salah satunya Montenegro.²⁶ Berdasarkan *Article 36 Chapter III Penalty Provisions about Misdemeanour liability of a family member on Law Domestic Violence Protection Official Gazette of MNE* Number 46 of 2010, denda sebesar minimal tiga kali lipat gaji minimum di Montenegro atau pidana penjara paling singkat sepuluh hari akan dikenakan kepada pelaku yang menyerang secara lisan, mengumpat, menyebut nama atau menghina anggota keluarga lainnya, menyangkal kebebasan berkomunikasi anggota keluarga lainnya dengan pihak ketiga, serta mengancam untuk mengusir dari tempat tinggal atau merebut anak-anak. Denda minimal lima kali lipat gaji minimum di Montenegro atau hukuman penjara minimal dua puluh hari akan dikenakan untuk pelanggaran pada anggota

¹⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 275.

²⁰ Ahmad Syahrus Sikti, *Op. Cit.*, hlm. 281.

²¹ Y. A. Triana Ohoiwutun dan Surjanti, “Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa dalam Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/Pn.Lmj”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, Desember 2018, hlm. 344.

²² Y. A. Triana Ohoiwutun dan Surjanti, *Loc. Cit.*, hlm. 338.

²³ *Ibid*, hlm. 343.

²⁴ Komnas Perempuan, “Korban Bersuara, Data Berbicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara”, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, 2019, hlm. 34.

²⁵ Ahmad Syahrus Sikti, *Op. Cit.*, hlm. 439.

²⁶ https://p2k.unkris.ac.id/id1/3073-2962/Montenegro_14528_Portal:Geografi_p2k-unkris.html, diakses Sabtu, 01 November 2021. Pukul 01.33 WIB.

keluarga dewasa yang melakukan tindakan kekerasan tersebut di hadapan anak kecil. Denda minimal sepuluh kali lipat gaji minimum di Montenegro atau hukuman penjara sekurang-kurangnya tiga puluh hari dikenakan untuk tindak pidana terhadap anggota keluarga dan korbannya adalah anak di bawah umur.

Selain Montenegro, Filipina juga mengatur kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai sebuah tindak pidana. Filipina mengatur ketentuan sanksi pidananya dalam *Section 6(f) about Penalties in Anti-Violence Against Women and Their Children Act Number 9262 of 2004*, yang menyatakan tindakan dalam *Section 5(h)* dan *Section 5(i)* akan dihukum dengan *prison mayor*²⁷. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu perempuan atau anak itu sedang hamil atau dilakukan di hadapan anaknya, maka hukuman yang akan diterapkan adalah hukuman maksimal dalam Pasal tersebut. Selain pidana penjara, pelaku harus:

1. Membayar denda paling sedikit seratus ribu peso atau kurang lebih sejumlah dua puluh delapan juta rupiah tetapi tidak lebih dari tiga ratus ribu peso atau kurang lebih sejumlah delapan puluh lima juta rupiah; dan
2. Menjalani konseling psikologis atau perawatan psikiatri dan melaporkan kepatuhan ke pengadilan.

Berbeda dengan Republik Montenegro dan Filipina, di Malaysia kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam *Domestic Violence Act 1994* Akta 521 atau biasa disebut sebagai Akta Keganasan Rumah Tangga Tahun 1994 yang diperuntukkan untuk melindungi korban dalam situasi keganasan rumah tangga dan perkara-perkara terkait.

²⁷ *Prison mayor* adalah pidana penjara untuk waktu antara 6 tahun 1 hari sampai dengan 12 tahun. Lihat, Rynaldo, Eko Soponyono, dan Bambang Dwi Baskoro, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 15.

Sedangkan pelaku juga tidak akan terlepas dari hukuman sebagaimana dijelaskan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)*, dimana ketentuan dalam Akta Keganasan Rumah Tangga Tahun 1994 harus dibaca bersamaan dengan *Penal Code of Malaysia*.²⁸

Pasal 8 Akta Keganasan Rumah Tangga Tahun 1994 diatur lebih jauh sanksi bagi pelanggaran perintah perlindungan sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar perintah perlindungan dengan keyakinan melakukan kesalahan dan pelanggaran, akan dikenakan denda tidak lebih dari dua ribu ringgit atau kurang lebih sejumlah tujuh juta rupiah atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan atau keduanya.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar perintah perlindungan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilindungi, akan dikenakan denda tidak lebih dari empat ribu ringgit atau kurang lebih sejumlah empat belas juta rupiah atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau keduanya.

Lebih lanjut, Singapore dalam *Family Violence Act Number 36 of 1995* juga mengatur perintah perlindungan pada *Article 4 paragraph (1)*, dimana dikatakan bahwa pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang seseorang melakukan kekerasan keluarga terhadap anggota keluarganya, apabila hal tersebut telah atau kemungkinan akan dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya. Pada *Article 10 Family Violence Act Number 36 of 1995* diatur tentang hukuman karena telah melanggar

²⁸ Rizky Amalia, Hafrida, dan Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia", *Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No.2, 2021, hlm. 3.

perintah perlindungan, yaitu setiap orang yang melanggar perintah perlindungan bersalah atas pelanggaran dan harus bertanggung jawab atas hukuman, pelanggaran pertama dijatuhi denda tidak lebih dari \$2.000 atau kurang lebih sejumlah dua puluh sembilan juta rupiah atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan atau keduanya, dan dalam kasus pelanggaran kedua atau berikutnya, denda tidak melebihi \$5.000 atau kurang lebih sejumlah tujuh puluh dua juta rupiah atau penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari tiga bulan dan tidak lebih dari dua tahun atau keduanya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Psikis yang Terjadi di Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pengaturan Sanksi Pidana Kekerasan Psikis dalam Hukum Positif Indonesia

Kekerasan psikis sebagai sebuah tindak pidana diatur dalam Pasal 5 huruf b yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tidak berhenti sampai disitu, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai sebuah tindak pidana yang memiliki sanksi, selanjutnya diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ketentuan sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga

tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak tiga juta rupiah.

2. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Psikis dalam Praktek Peradilan Indonesia.

Pada prakteknya, kasus kekerasan psikis setiap tahun terus meningkat. Komnas Perempuan pada tahun 2020 mencatat kekerasan psikis sebagai kekerasan yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 823 kasus (42%), disusul kekerasan fisik 425 kasus (22%), kekerasan ekonomi 363 kasus (18%), dan kekerasan seksual 349 kasus (18%).²⁹ Bahkan, hanya sebagian kecil korban kekerasan psikis yang mau melanjutkan kasusnya ke ranah hukum.³⁰ Begitu pula dengan tahun 2021, kekerasan psikis kembali menduduki posisi pertama sebagai kekerasan yang paling banyak terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini membuktikan tujuan pemidanaan, yakni melindungi tertib hukum, untuk mencegah kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan³¹ sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

²⁹ Komnas Perempuan, *Op. Cit.*, hlm. 31.

³⁰ Wawancara dengan Advokat Perlindungan Perempuan dan Anak, Noviana Monalisa, S.H., M.Hum., M.M., tanggal 31 Oktober 2021 melalui Panggilan WhatsApp.

³¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih belum tercapai. Mengingat tidak ada keserasian antara aturan dan penerapannya.³²

Noviana Monalisa berdasarkan pengalamannya berpandangan, tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai delik materil yang melarang akibat tertentu yang berada pada ranah psikis atau kejiwaan seseorang, kerap kali dilakukan oleh pelaku dengan tanpa sadar atau tanpa maksud memberikan penderitaan psikis kepada korban. Sehingga dapat dikatakan beberapa pelaku juga memiliki masalah atau riwayat gangguan jiwa. Oleh karena itu pada kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga, sanksi pidana berupa rehabilitasi pada penerapannya akan lebih memberikan keadilan dari pada sanksi pidana penjara.³³

Dalam hal ini, bentuk pembedaan pada kasus kekerasan psikis bersifat alternatif, yakni hukuman penjara atau hukuman denda, sehingga pada penerapannya tidak mampu membuat pelaku jera. Bahkan sebagai delik aduan dan kekerasan yang terjadi pada ranah domestik, jenis hukuman ini menciptakan keragu-raguan bagi penegak hukum, khususnya penyidik dalam melakukan penegakan hukum.³⁴

Sanksi pidana kekerasan psikis di Indonesia yang lebih menekankan kepada pidana penjara dapat digolongkan sebagai sanksi yang tidak implementatif dan belum mampu

mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini pada akhirnya menimbulkan kesenjangan pada *das sollen* dan *das sein* penerapan sanksi pidana kekerasan psikis di rumah tangga Indonesia.³⁵ Pertimbangan tersebut pada akhirnya melahirkan fenomena gunung es yang semakin lama semakin besar dan tidak dapat lagi diabaikan, serta mengabaikan kenyataannya bahwa kekerasan psikis adalah tindak pidana yang kompleks dan sulit teridentifikasi.³⁶

B. Reformulasi Sanksi yang Tepat terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

1. Fenomena Gunung Es Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020 mendapati dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya meningkat hampir delapan kali lipat. Diagram tersebut masih merupakan fenomena gunung es yang menggambarkan kondisi perempuan Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman. Arti lainnya adalah bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran.³⁷

CATAHU Komnas Perempuan 2020 mencatat sepanjang tahun 2019, kekerasan psikis sebagai kekerasan yang paling banyak terjadi dalam rumah tangga, yaitu sebanyak 823

³² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 71.

³³ Wawancara dengan Advokat Perlindungan Perempuan dan Anak, Noviana Monalisa, S.H., M.Hum., M.M., tanggal 31 Oktober 2021 melalui Panggilan WhatsApp.

³⁴ Akhmad Marjuki, "Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 102.

³⁵ Wawancara dengan Advokat Perlindungan Perempuan dan Anak, Noviana Monalisa, S.H., M.Hum., M.M., tanggal 31 Oktober 2021 melalui Panggilan WhatsApp.

³⁶ Ahmad Syahrus Sikti, *Op. Cit.*, hlm. 450.

³⁷ Komnas Perempuan, *Ibid*, 2020, hlm.7.

kasus (42%).³⁸ Begitupula pada tahun 2021, CATAHU Komnas Perempuan kembali mencatat sepanjang tahun 2020 bentuk kekerasan di ranah relasi personal teridentifikasi di antaranya yang paling dominan adalah kekerasan psikis sebanyak 1.079 kasus (40%).³⁹ Fenomena ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat Indonesia.

2. Dampak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis yang dilakukan secara verbal mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati korban.⁴⁰ Psikolog Liza Marielly Djaprie mengatakan kekerasan verbal beririsan dengan kekerasan psikis yang dampaknya lebih buruk dari kekerasan fisik yang bekasnya terlihat dan bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Kekerasan verbal membutuhkan waktu pemulihan yang cenderung lama melalui terapi dan pendampingan karena dilakukan dengan pelan dan konsisten.⁴¹

Kekerasan psikis menyebabkan kejiwaan korban terganggu. Setiap detik, hari bahkan tahun korban yang mengalami kekerasan akan merusak *self control* yang ada dalam dirinya.

³⁸ *Ibid*, hlm. 31.

³⁹ Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, 2021, hlm. 55.

⁴⁰ Yulianti Hotifah, "Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Personifikasi*, Vol. 2, No. 1, Mei 2011, hlm. 64.

⁴¹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/228624/psikolog-sebut-kekerasan-verbal-lebih-bahaya-ketimbang-fisik>, diakses Sabtu, 20 November 2021. Pukul 20.51 WIB.

Tekanan, intimidasi dan ancaman yang diterimanya akan membekas dan mempengaruhi kestabilan diri, cara pandang, sikap, pola pikir dan perilaku korban yang menyebabkan traumatik berkelanjutan yang jika dibiarkan akan berujung kepada terganggunya kejiwaan. Gangguan psikis yang dialami korban jika tidak diobati dan diacuhkan begitu saja akan mengakibatkan gangguan jiwa level rendah sampai akut seperti berbicara sendiri, suka menyendiri, dan menangis.⁴² Traumatik berkelanjutan yang dialami korban tanpa disadari kerap melahirkan karakter baru, sehingga korban juga dimungkinkan untuk menjadi pelaku dikesempatan berikutnya.

Lebih lanjut kekerasan psikis berupa tindakan pengendalian, manipulasi, pengekangan, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan atau ucapan yang merendahkan dan menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis sejatinya dapat mengakibatkan penderitaan psikis berupa ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat, hingga disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat, depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia* dan/atau bentuk psikotik lainnya, bahkan dapat menyebabkan korban mengakhiri hidupnya.⁴³

⁴² Ahmad Syahrus Sikti, *Op. Cit*, hlm. 439.

⁴³ Hairul Hudaya, "Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)". *Jurnal Musāwa*, Vol. 16, No. 1, Januari 2017, hlm. 55.

3. Urgensi Reformulasi Sanksi Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Salah satu Undang-Undang yang paling banyak digunakan dan menjadi langkah maju negara Indonesia dalam penghapusan kekerasan di ranah rumah tangga adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembaharuan hukum tersebut dinilai berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi khususnya perempuan. Apalagi terdapat relasi gender yang patut dipertimbangkan, di mana perilaku kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga dan relasi personal adalah penggunaan kekuasaan dan kontrol yang tidak muncul dalam kekerasan lain.⁴⁴

Namun hingga saat ini, terdapat kesenjangan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Kepolisian dan tidak sampai ke tahap Pengadilan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan kekerasan psikis sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum.⁴⁵ Data-data menunjukkan kekerasan psikis secara konsisten menjadi kategori kekerasan yang paling banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuktikan tujuan pemidanaan, yakni melindungi tertib hukum, untuk mencegah kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan masih belum tercapai. Oleh karenanya sebagai upaya penanggulangan kekerasan psikis yang semakin meningkat dan pentingnya melahirkan paradigma baru, guna memberikan keadilan dan mengubah perspektif masyarakat terhadap kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga, maka perlu dilakukan reformulasi sanksi pidana

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk menghadirkan hukum yang lebih tepat dalam mengatasi tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Menimbang, sanksi kekerasan psikis yang dihadirkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih menekankan pada pidana penjara yang tergolong ringan tanpa kemudian memperhatikan dampak yang dihasilkan dari kekerasan psikis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan manfaat pemidanaan yang ingin dicapai.

4. Reformulasi Sanksi Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Dengan berbagai pertimbangan, peneliti menawarkan gagasan berupa reformulasi sanksi pidana pokok kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga menjadi sanksi pidana rehabilitasi, penambahan pidana penjara, dan penambahan pidana denda. Sehingga sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dirumuskan sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan maksud melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan penyakit atau

⁴⁴ Komnas Perempuan, *Op. Cit.*, 2021, hlm. 37.

⁴⁵ Ahmad Syahrus Sikti, *Op. Cit.*, hlm. 437.

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).

- (3) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuktikan atau terbukti mengidap gangguan mental ringan (*mental disorder*) akibat traumatik masa lalu, diputuskan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga yang terbukti mengidap gangguan mental ringan (*mental disorder*) akibat traumatik masa lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Gagasan ini tidak terlepas dari pandangan Jeremy Bentham tentang hukum yang mempertimbangkan situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Sehingga pembedaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini berorientasi ke depan (*forward-looking*).⁴⁶ Sebagai dasar dari konstruksi berpikir, argumen proporsionalitas ancaman pidana didasarkan pada tiga hal sebagai berikut.⁴⁷

- a. Sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan yang dilarang

harus berupa tindakan menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan;

- b. Beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan; dan
- c. Ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat keseriusan perbuatan dan kesalahan pelanggar.

Dengan demikian, gagasan hukum yang peneliti tawarkan sejatinya telah memperhatikan unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukasi, dan keadilan yang seluruhnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga sekiranya mampu mengubah paradigma masyarakat terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga dan menjamin setiap warga negara, khususnya korban kekerasan psikis dalam rumah tangga atas rasa aman, serta menjamin perlindungan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Oleh karena itu, fokusnya bukan hanya meneguhkan pola-pola berupa motif dan cara kerja, tetapi lebih berusaha menghadirkan keadilan dan menciptakan hubungan baru yakni kesetaraan dalam relasi rumah tangga.⁴⁸

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tataran pengaturan, merupakan terobosan paradigmatik yang diproyeksikan sebagai suatu keseimbangan baru yang memerlukan dukungan sosial dan hukum, guna menghentikan tradisi selama ini yang rentan dan potensial melahirkan

⁴⁶ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, Desember 2009, hlm. 624.

⁴⁷ Andrew Von Hirsch dan Andrew Ashworth, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*, New York: Oxford University Press, 2005, hlm. 17-18.

⁴⁸ Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Hukum, Etika, dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm.103.

kekerasan dalam rumah tangga. Keseimbangan baru ini kemudian dipandang sebagai lompatan paradigma yang menyertakan *accent of reality*, yakni kebaruan memandang realitas. Pada penerapannya, sanksi pidana kekerasan psikis tergolong sebagai sanksi yang tidak implementatif dan tidak mempertimbangkan dampak kekerasan psikis yang dapat lebih buruk dari kekerasan fisik. Pada akhirnya sanksi yang ada menjadi penghambat dalam memproyeksikan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat, Hal ini pada prakteknya menciptakan kesenjangan pada *das sollen* dan *das sein* penerapan sanksi pidana kekerasan psikis di rumah tangga Indonesia, sehingga perlu direformulasi.

2. Penempatan rehabilitasi menjadi pidana pokok dan peningkatan sanksi pidana penjara dan pidana denda pada tindak pidana kekerasan psikis menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) merupakan gagasan yang disusun dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Reformulasi sanksi pidana tersebut menjadi penting sebagai usaha meminimalisir dan menghapuskan kekerasan psikis dalam rumah tangga yang kerap kali digambarkan sebagai fenomena gunung es, menjamin perlindungan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta membentuk paradigma baru di tengah masyarakat terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga bahwa kekerasan psikis perlu ditangani, ditanggapi, dan disikapi dengan lebih serius. Dengan demikian, setiap warga negara dapat diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai

mahluk Tuhan Yang Maha Esa, sama hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dengan tujuan mencapai cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dalam hal ini tidak terlepas dari tujuan pemidanaan.

B. Saran

1. Mengingat kekerasan psikis cukup rentan disalahgunakan untuk melimpahkan kesalahan pelaku kepada korban. Maka pada tataran *law enforcement*, aparat penegak hukum harus benar-benar jeli memperhatikan ketentuan hukum yang ada guna menyikapi perkara yang ditanganinya dan menghindari penyalahgunaan sanksi. Hukum tidak boleh hanya bergantung kepada kepastian, namun juga harus memperhatikan kebermanfaatan dan hati nurani demi tercapainya keadilan. Kecenderungan untuk membawa kasus ke pengadilan, harus diimbangi dengan kehati-hatian menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Orientasi penegak hukum harus diubah dari menjatuhkan pidana menjadi memperbaiki terpidana (dari *punishment* menjadi *treatment*), dengan memperhatikan manfaat pemidanaan guna menghadirkan pidana tepat sasaran yang berkeadilan dan berdaya guna demi tercapainya tujuan hukum pidana.
2. Peningkatan ancaman pidana sejatinya merupakan upaya menunjukkan kesungguhan bahwa akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis lebih dari mampu mengakibatkan traumatik berkelanjutan hingga kematian. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah, tindak pidana kekerasan psikis sejatinya harus dipandang sekurang-kurangnya sama tercelanya dengan tindak pidana kekerasan fisik, guna mengangkat setinggi-tingginya mosi penghapusan tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2019. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Djamali, R. Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Duwi, Handoko. 2015. *Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Fauzan, H.M dan Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Depok: Kencana.
- Hirsch, Andrew Von dan Andrew Ashworth. 2005. *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*. New York: Oxford University Press.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2017 *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mukhlis R. 2019. *Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Najih, Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

- Renggong, Ruslan. 2019. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sikti, Ahmad Syahrus. 2020. *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori 1)*. Yogyakarta: UII Press.
- Suseno, Frans Magnis. 1998. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susila, M. Endriyo Susila. 2007. *Buku Pedoman Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Amalia, Rizky, Hafrida, dan Elizabeth Siregar. "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia". *Journal of Criminal Law*. Vol. 2. No.2. 2021.
- Arini, Resti. "Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga sebagai Suatu Tindak Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 2. No. 5. September 2013.
- Ariyanti, Vivi. "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi". *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Vol. 3. Issue. 2. September 2019.
- Hudaya, Hairul. "Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)". *Jurnal Musāwa*. Vol. 16. No. 1. Januari 2017.
- Hotifah, Yuliati. "Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Personifikasi*. Vol. 2. No. 1. Mei 2011.
- Komnas Perempuan. 2019. "Korban Bersuara, Data Berbicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara". *Catatan Tahunan tentang*

- Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2020. “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2021. “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Marjuki, Akhmad. “Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”. *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*. Vol. 6. No. 1. Januari-Juni 2015.
- Ohoiwutu, Y. A. Triana dan Surjanti. “Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa dalam Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga”. Fakultas Hukum Universitas Jember. *Jurnal Yudisial*. Vol. 11. No. 3. Desember 2018.
- Rynaldo, Eko Soponyono, dan Bambang Dwi Baskoro. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Vol. 5. No. 2. Desember 2016.
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10. No. 1. Juni 2019.
- Suhariyono AR. “Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6. No. 4. Desember 2009.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- D. Website**
- <https://www.kompasiana.com/opiksuka/5512dbfaa33311de67ba7d74/reformula-si-gerakan-mahasiswa>, diakses Sabtu 29 Mei 2021. Pukul 18.06 WIB.
- https://p2k.unkris.ac.id/id1/3073-2962/Montenegro_14528_Portal:Geografi_p2k-unkris.html, diakses Sabtu, 01 November 2021. Pukul 01.33 WIB.
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/228624/psikolog-sebut-kekerasan-verbal-lebih-bahaya-ketimbang-fisik>, diakses Sabtu, 20 November 2021. Pukul 20.51 WIB.